



2023

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022

BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Biro Umum Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2023

Kepala Biro Umum,



Syefdinon, S.Sos. M.M
Pembina Tingkat I
Nip. 19720713 199803 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BIRO UMUM	3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BIRO UMUM	7
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	7
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	7
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	8
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	12
2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	13
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	14
1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	14
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ	15
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi	16
2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA	
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	18
3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN	18
1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	18
2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	18
3.2. HAMBATAN / PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	19
1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	19
2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Dibawahnya	19
BAB IV PENUTUP	20

BAB I

DATA / INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BIRO UMUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

LKPJ Biro Umum Tahun 2022 ini disusun dengan maksud memberikan informasi kinerja yang terukur tentang capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan selama satu periode anggaran.

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Umum berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Tugas pokok Biro Umum berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah “membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha”.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro Umum melaksanakan fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha
2. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Tata Usaha Biro, Persuratan dan Arsip Sekretariat Daerah dan Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Kendaraan, Persuratan dan Arsip dan Tata Usaha Biro, Pimpinan dan Staf Ahli;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Kendaraan, Persuratan dan Arsip dan Tata Usaha Biro, Pimpinan dan Staf Ahli; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah, Akuntansi dan Penatausahaan Aset dan Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah, Akuntansi dan Penatausahaan Aset dan Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah,

- Akuntansi dan Penatausahaan Aset dan Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bagian Rumah Tangga

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Urusan Rumah Tangga Gubernur, Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur dan Urusan Dalam.

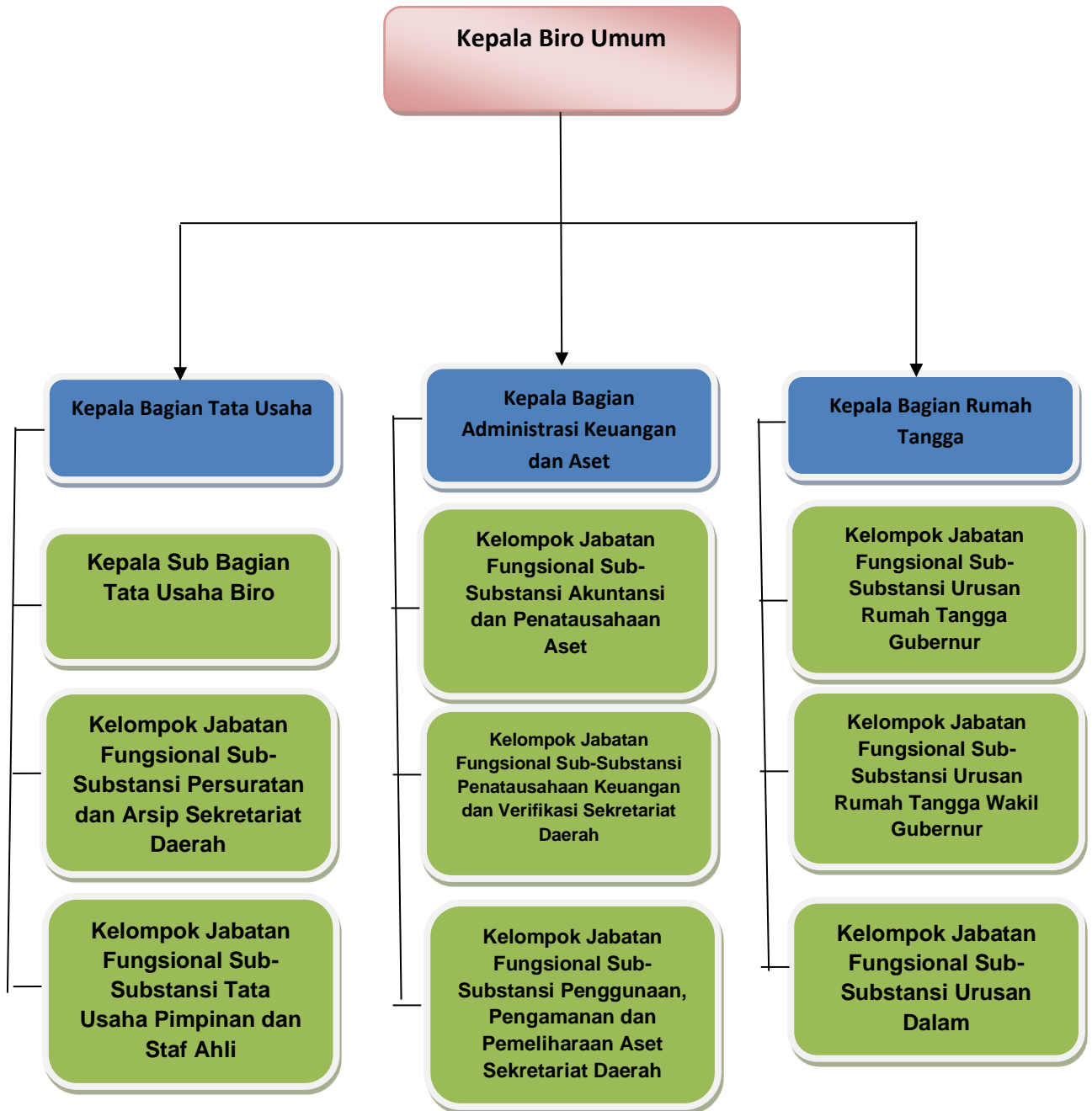
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Urusan Rumah Tangga Gubernur, Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur dan Urusan Dalam;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Urusan Rumah Tangga Gubernur, Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur dan Urusan Dalam; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka susunan struktur organisasi Biro Umum yang dipimpin oleh Kepala Biro Umum terdiri dari 3 Bagian yang masing – masingnya dipimpin oleh Kepala Bagian dan 1 Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian serta 8 Sub Koordinator yang dipimpin oleh Kelompok Jabatan Fungsional dapat dilihat pada grafik berikut ini:

GRAFIK 1
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIRO UMUM SETDA PROV. SUMBAR



BAB II
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG
DILAKSANAKAN BIRO UMUM

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Urusan Penunjang Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Biro Umum, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 86,801,558,683,- pada Anggaran Murni dan menjadi Rp.108.021.880.615,- pada anggaran perubahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.103.782.205.225,- atau 96,08%, dengan uraian sebagai berikut :

1. **Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	– IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	– Sangat Baik (88,50)	– Sangat Baik (89,38)	100,99
		– IKM Pelayanan Pimpinan	– Sangat Baik (88,50)	– Sangat Baik (89,18)	100,77
		– IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	– Sangat Baik (88,50)	– Sangat Baik (89,02)	100,59

Keterangan:

1. **Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;**

2. Kolom 2: Diisi dengan Program yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian kinerja;
4. Kolom 4: Diisi dengan Target Kinerja dalam Perjanjian kinerja;
5. Kolom 4: Diisi dengan Realisasi Target Kinerja;
6. Kolom 5: Diisi dengan Persentase antara Target kinerja dengan realisasi.

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	108.021.880.615	103.782.205.225	96,08
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	383.709.782	376.168.284	98,03
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	44.534.819.322	41.741.591.759	93,73
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%	100%	559.759.929	553.626.836	98,90
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	89.592.000	87.821.850	98,02

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKj) 2022

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	673.410.000	655.435.342	97,33
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	8.208.330.399	8.165.431.451	99,48
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	3.380.770.962	3.355.616.519	99,26
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	14.645.663.553	13.873.313.781	94,73
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	9.975.229.945	9.653.978.008	96,78
10	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	100%	100%	5.071.049.601	4.988.235.848	98,37
11	Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah		100%	100%	100%	20.499.545.122	20.330.985.547	98,18

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;

2. Kolom 2: Diisi dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan Target dalam dokumen anggaran;
5. Kolom 5: Diisi dengan Realisasi Target dalam dokumen anggaran;
6. Kolom 6: Diisi dengan Persentase antara Target dengan realisasi.
7. Kolom 7 : Diisi dengan Alokasi Anggaran
8. Kolom 8 : Diisi dengan Realisasi Anggaran
9. Kolom 9 : Diisi dengan Persentase Realisasi

Tabel 2.3

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Secara umum tidak ada permasalahan terhadap pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah pada biro umum karena secara fisik dapat relaksana 100% dan secara keuangan terlaksana 96,08%	Agar pelaksanaan program lebih tertib terhadap target yang telah ditetapkan pada anggaran kas.	-
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	-	-	-

No	Program / Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Perangkat Daerah			
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
10	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-
11	Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	-	-	-

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;

2. Kolom 2: Diisi dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Permasalahan masing-masing Program/Kegiatan;
4. Kolom 4: Diisi dengan Upaya mengatasi permasalahan;
5. Kolom 4: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2021;

3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dicapai dengan pelaksanaan :
 - 1) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan outputnya adalah Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah 100% sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan outputnya Persentase Tertib Administrasi Keuangan 100% sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan outputnya adalah Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 100% sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan outputnya adalah Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah 100% sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan outputnya adalah Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

- 6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan outputnya adalah Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan outputnya adalah Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan 100% sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan outputnya Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan outputnya Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik 100% sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 10) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan outputnya Persentase Tertib Administrasi Keuangan KDH/WKDH 100% sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 11) Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan outputnya Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda 100% sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2022 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Biro Umum, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Biro Umum Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1			
2	Dst		

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi kebijakan strategis yang diprakarsai oleh perangkat daerah;
3. Kolom 3: Diisi peraturan tentang kebijakan strategis tersebut berupa Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan terbitnya kebijakan strategis tersebut.

2.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Biro Umum, telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD :

Tabel 2.5
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat TA 2020 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6
Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi Pansus LKPJ atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat ATA 2019 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

3. Tindak Lanjut rekomensai Fraksi

Tabel 2.7
Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi Fraksi atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat TA 2020 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Biro Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain :

Tabel 2.8
Penghargaan yang Diraih Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1		NIHIL		
2				
3				

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Nama penghargaan;
3. Kolom 3: Diisi nama pemberi penghargaan dan lembaga pemberi penghargaan;
4. Kolom 4: Diisi Perangkat Daerah Penerimaan Penghargaan;
5. Kolom 5: Diisi tempat dan tanggal penerimaan penghargaan;

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 tidak ada mendapatkan alokasi anggaran yang berhubungan dengan Tugas Pembantuan.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1		NIHIL			
2					
3					

Sumber: Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat , 2022

2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

Biro Umum Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 tidak melaksanakan pelimpahan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk apapun.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penugasan Tahun 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Penerima
1		NIHIL			
2		NIHIL			
3		NIHIL			

Sumber: Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat, 2022

3.2 HAMBATAN/ PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

a. Permasalahan

NIHIL

b. Upaya Penyelesaian

NIHIL

2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

a. Permasalahan

NIHIL

b. Upaya Penyelesaian

NIHIL

BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.